



RAJADIBON

Jurnal
SUJWA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

Vol. III, No. 3, Desember 2005

Alamat:

Universitas Malikussaleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26, Lhokseumawe
Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia
P.O. Box 141, Telp. (0645) 41373-40915, Fax. 44450



Terbit 6 kali setahun, sejak 2003

Jurnal SUWA
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. III, No. 3, Desember 2005

Penasehat:	A. Hadi Arifin, M.Si. (Rektor Universitas Malikussaleh)
Penanggung Jawab:	M. Akmal, MA. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
Ketua Dewan Redaksi:	Al Chaidar, SIP.
Wakil Dewan Redaksi:	M. Nazaruddin, S.S., M.Si.
Sekretaris Redaksi:	Iskandar Zulkarnaen, SE., M.Si.
Bendahara:	Cut Sukmawati, SE.
Anggota Dewan Redaksi:	Drs. Aiyub, M.Si. Rasyidin, S.Sos. Ti Aisyah, S.Sos. Muhammad Ali, S.Ag.
Redaksi Pelaksana:	Alwi, S.Sos., M.Si. Fauzi, S.Sos., M.A. Mauludi, S.Sos. Muhammad Hasyem, S.Sos. Subhani, S.Sos. M. Rizwan, S.Ag. Muntasir, S.Ag., MA.
Editor Ahli:	Prof. Dr. Amri Marzali (Antropolog UI) Prof. Dr. Parsudi Suparlan (Antropolog UI) Prof. Dr. Teuku Haji Ibrahim Alfian (Antropolog UGM) Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. (Antropolog Unsyiah) Dr. Sarwono Kusuma Atmaja (eks Menteri LH) Dr. Rizal Geuci (LIPI) Dr. Muhammad Isa Sulaiman (Ilmuwan Sejarah Unsyiah) Dr. Ahmad Humam Hamid (Sosiolog Unsyiah) Dr. Irwan Abdullah (Antropolog UGM) Dr. Hamdi Muluk (Psikolog UI) Dr. Maidar (LIPI) Fachry Ali, MA. (LSPEU Jakarta) M. Akmal S.Sos., MA. (Ilmuwan Politik UM) Ahmad Suhelmi, MA. (Ilmuwan Politik UI) Drs. Humaizi, MA. (Ilmuwan Komunikasi USU) Drs. M. Rifki Muna, MA. (LIPI) Drs. Irwan Martua, MA. (Antropologi UI)
Staf Tata Usaha:	Zakaria, SE. Nurmalawiah, S.Sos. Elizar T. Alfiadi

Alamat:

Universitas Malikussaleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 26, Lhokseumawe
P.O. Box 141, telp. (0645) 41373-40915, Fax. 44450

Terbit 6 kali setahun, sejak 2003

Jurnal SUWA
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. III, No. 3, Desember 2005

Daftar Isi

Mengubah Tragedi Menjadi Transformasi: Rekonstruksi Ekonomi Aceh Pasca-Tsunami	1-17
<i>Abdul Hadi Arifin M.Si. dan Apridar, M.Si.</i>	
Kejahatan Perbankan	19-53
<i>Fauzi, S.Sos., M.A.</i>	
Peran Mahasiswa sebagai Agent of Change dalam Mengkritisi Kebijakan Pembangunan	55-62
<i>Rasyidin, S.Sos., M.A. ✓</i>	
Fight for Independence or Fight for Democracy	63-113
<i>Al Chaidar</i>	
Produktivitas dalam Islam	115-118
<i>Drs. Aiyub, M.Si.</i>	

Peran Mahasiswa sebagai Agent of Change dalam Mengkritisi Kebijakan Pembangunan

— Rasyidin, S.Sos., M.A.* —

Abstrak

Peran mahasiswa sangat diperlukan dalam berbagai aktivitas masyarakat dan pemerintah, hal ini sangat sesuai karena mahasiswa sebagai salah satu element yang disandang mereka, yaitu sebagai sosial control dan agent of change. Walau-pun hal ini masih terjadi pro dan kontra, akan tetapi fungsi ini telah mampu ditunjukkan oleh mahasiswa Indonesia. Perubahan paradigma yang mereka lakukan masih segar dalam ingatan kita, seperti yang di tunjukkan para masa orde lama. Bahkan yang masih sangat baru dalam ingatan kita yaitu peran mahasiswa dalam menunbangkan rezim orde baru, mereka ganti dengan era reformasi. Secara umum peran mahasiswa tidak bisa dikesampingkan, jika negara, institusi dan apapun nama ingin menjadi negara yang mempunyai kharisma dan bermarwah. Aktivitas mahasiswa bukan hanya terjadi di Indonesia, namun di negara-negara yang sudah majupun masih terjadi, seperti; di Jepang, Korea Selatan dan lain-lain.

Kata kunci: mahasiswa, agent of change, social control.

* Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Pendahuluan

Mahasiswa sebagai kaum intelektual muda, kini berada dalam persimpangan. Antara perjuangan ideologi dan pragmatisme. Jargon sebagai *agent of change and social control*, kini seakan-akan hanyalah tinggal mitos belaka.

Jika kita mau membuka lembaran sejarah perjuangan kemerdekaan, maka akan kita jumpai di sana sebuah lembaran yang mengharumkan nama mahasiswa. Sekelompok kecil mahasiswa "*Boemi Poetra*" menempati posisi *avant garde* (kepeloporan). Bahkan posisi kepeloporan itu menjadi amat eksklusif lantaran masih amat langkanya kekuatan sosial kepemudaan selain mahasiswa di masa kebangkitan nasional tersebut. Ketika kita membuka lembaran sejarah perjuangan pasca perang kemerdekaan, kita juga akan menjumpai beberapa lembaran yang kembali mengharumkan nama mahasiswa. Jatuhnya rezim Orde Lama dan Orde Baru juga tidak lepas dari kepeloporan mahasiswa di garda depan.

Tidak berlebihan kiranya jika kemudian masyarakat mengklaim mahasiswa sebagai *agent of change and social control*, walaupun sebenarnya yang harus mengontrol kondisi sosial dan melakukan perubahan adalah seluruh masyarakat dan bukan hanya mahasiswa.

Tinggal Mitos

Sayangnya, peran mahasiswa sebagai *agent of change and social control* sekarang hanyalah sebuah mitos belaka. Sedikit sekali peran nyata mereka dalam hal ini. Sistem pendidikan yang tidak manusiawi, yang hanya ingin menciptakan tenaga kerja siap pakai dan siap jual, yang hanya menggiring mahasiswa dengan *how to know things* (penalaran teoritis) daripada penguasaan *aspek how to do things* (ketrampilan), menyebabkan munculnya pandangan-pandangan pragmatis di kalangan mahasiswa. Mahasiswa hanya mau tahu dengan apa yang sudah ada di depannya tanpa mau membuka kesadaran kritisnya dan tidak mau melihat lebih dekat tentang apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan sosialnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Djaduk Ferianto, seniman Yogyakarta pencetus grup seni Kua Etnika kepada kru Canopy. Menurutnya, sistem pendidikan sekarang ini seperti pabrik yang hanya mencetak kuantitas bukan kualitas. Perguruan Tinggi hanya berusaha sebanyak mungkin mencetak sarjana tanpa peduli bagaimana kualitasnya. "Hasilnya bisa dilihat, lulusannya banyak yang bekerja di luar bidang keilmuannya, sarjana seni tapi jadi guru Geografi, sarjana pertanian tapi jadi pegawai bank," inilah yang sedang terjadi sehingga mahasiswa pun menjadi terasingkan dari realitas sosial yang ada.

Demikian pula dengan PPK (*Program Percepatan Kuliah*) yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Pada akhirnya hanya memunculkan mahasiswa-mahasiswa IP minded. Mahasiswa yang terbuai dalam teori-teori kuliahnya. Mahasiswa yang terus berpikir bagaimana memecahkan teori untuk

sekedar mengejar nilai A, B atau C dari dosen tanpa mau memikirkan aplikasi dan dampak dari teori tersebut bagi lingkungan sosialnya. Terciptalah mahasiswa yang banyak menguasai teori dengan alokasi yang tipis. Namun anehnya, hal tersebut tidak membuat mahasiswa sadar akan perannya, tapi malah menambah tali pembatas antara mahasiswa dengan realitas sosial.

Pandangan yang berbeda datang dari PD I FE UM, Drs. Heri Pratikto. "Sebenarnya tidak ada masalah dengan PPK. Masalahnya terletak pada mahasiswa yang cenderung jelek dalam memanajemen waktu. Yang ikut organisasi cenderung mengabaikan studinya, yang serius di dalam studi menjadi *study oriented*. Sehingga mahasiswa sekarang kurang bisa seimbang antara studi dan organisasi," ujarnya dengan tegas.

Bagaimana dengan Kampus Capping?

Perilaku pragmatis pada sebagian besar mahasiswa Indonesia sekarang ini tidak jauh berbeda dengan mahasiswa di Nanggroe Aceh Darussalam. Di kampus capping ini, kondisi mahasiswa yang seharusnya memiliki intelektualitas tinggi dengan tanggung jawab yang besar, ternyata tidak banyak dijumpai. Padahal seorang intelektual, menurut *Daisaku Ikeda, seorang pemimpin spiritual* Jepang, haruslah mampu membantu sesamanya untuk melihat lebih jelas apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi dalam kehidupan umat manusia.

Perilaku pragmatis ini tampak dari hasil polling tim lipsus CANOPY. Dari 324 responden, 69,85 % (227 responden) menyatakan sepakat dengan peran dan fungsi mahasiswa sebagai *agent of change and social control*. Tapi nyatanya, kesepakatan itu hanya selesai pada tataran tahu dan kata saja. Belum sampai pada tataran paham, sadar dan aksi. Karena hanya 45,82 % (148 responden) yang menyatakan sudah pernah mengikuti kegiatan sosial di luar akademik yang berhubungan langsung dengan pengabdian masyarakat. Sedang sisanya 54,18% (175 responden) menyatakan belum pernah mengikutinya pengabdian kepada masyarakat Akhirnya, terbentuklah mahasiswa NATO (*No Action Talk Only*).

Kalaupun mahasiswa sudah pernah melakukan kegiatan sosial (148 responden), bentuk pengabdianpun kebanyakan hanya cenderung mengarah pada pengabdian secara fisik/ materi yang sifatnya instan, seperti baksos (60 responden). Adapun pengabdian yang cenderung berupaya mencerdaskan paradigma berpikir masyarakat, seperti pendampingan kepada petani hanya pernah diikuti oleh 2 responden.

Ironis sekali, mahasiswa Indonesia tapi banyak yang tidak tahu menahu atau apatis tentang kondisi sosial Indonesia. Padahal jika mahasiswa mau bergerak secara aktif, masyarakatlah yang pertama akan mendukung gerakan itu, apalagi disiplin ilmunya searah. Tapi apakah itu dapat terwujud, kalau mahasiswa tidak kenal dengan kondisi sosial yang sebenarnya?

Kondisi ini diperparah lagi dengan sistem akademis yang selama ini hanya menjadikan mahasiswa sebagai kaum elit bagi masyarakat terutama rakyat kecil. Sistem akademis kurang mengakrabkan mahasiswa dengan lingkungan masyarakat serta kurang mengenalkan dimensi-dimensi lain di luar disiplin ilmu yang ditekuninya. Hal ini didukung oleh 56,79 % responden yang menyatakan bahwa kegiatan akademis, bahkan PMM (*Pengabdian Mahasiswa pada Masyarakat*) yang notabene memang ditujukan sebagai salah satu bentuk pengabdian mahasiswa ke masyarakat, kurang efektif dalam mengarahkan mahasiswa kepada pengabdian masyarakat. Sedangkan 31,17% menjawab belum efektif. Hanya 12,04% responden yang menjawab kegiatan akademis selama ini sudah mengarahkan mahasiswa kepada pengabdian masyarakat.

Padahal tujuan mahasiswa kuliah pada umumnya mencari ilmu. Setidaknya, itulah yang bisa dibaca dari 60,62% responden yang menjawab demikian. Hanya 15,69 % responden yang tujuan awalnya untuk mencari gelar sarjana dan mendapatkan ijazah demi peningkatan status sosial yang ujung-ujungnya memperoleh pekerjaan yang layak.

Dari sini, ada sisi lain yang masih bisa diharapkan guna menyadarkan peran mahasiswa di garis depan perjuangan rakyat. Tentunya dengan modal 60,62% responden untuk ke arah sadar akan peran mahasiswa yang sebenarnya. Jika memang tujuan utama mahasiswa kuliah untuk mencari ilmu, tidak harus tergantung dengan yang namanya sistem akademis. *Michael Foucault* dalam bukunya *The Archeology of Knowledge* mengatakan, untuk menjadi seorang intelektual, kita harus mulai mengembangkan *praktek intellectual nomadism*. Maksudnya seorang intelektual tidak harus membatasi diri pada suatu wacana tertentu, tetapi haruslah menempatkan diri pada suatu tataran tanpa dibatasi horison serta melekatkan diri pada dialog teoritis tanpa akhir. Ketika sistem akademis tidak bisa diandalkan untuk membawa mahasiswa ke arah sadar akan peran dan tanggung jawabnya, mahasiswa bisa beralih kepada berbagai forum kajian dan diskusi yang lebih menawarkan wacana tentang kondisi sosial di dalam dan di luar kampus. Karena mahasiswa, tidak akan bisa bergerak tanpa sebuah kompromi. Dan dengan diskusi atau dialoglah salah satu caranya untuk mengawali gerakan nyata itu..

Tampaknya untuk mencapai mahasiswa yang sadar perannya akan menemui banyak hambatan dan kesulitan. Karena begitu banyak pihak yang memegang peranan dalam membentuk wataknya, baik lingkungan, keluarga, sistem ataupun faktor intern dari dalam dirinya sendiri. Semua sisi itu sama-sama turut ambil bagian.

Untuk itu, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk melakukan perubahan terhadap kondisi mahasiswa sekarang ini. Karena kalau mau jujur, bagaimana mungkin seorang calon pemimpin bangsa dipersiapkan dengan cara memisahkan mereka dari realitas bangsanya? Dan yang lebih penting, diperlukan kesadaran mahasiswa untuk lebih kritis dan peduli terhadap realitas sosial yang ada. Karena berbaurnya mahasiswa dengan realita sosial yang ada,

akan memunculkan pemikiran serta hasil-hasil yang nyata daripada sekedar hura-hura. Hasil nyata yang mempunyai keberpihakan pada rakyat kecil, kaum yang selama ini termarjinalkan.

Kebijakan Pembangunan

Kebijakan mengandung pengertian apa yang hendak dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah atau negara. *What ever government todo or not todo* (David Easton). Sedangkan menurut pendapat Carl L. Friedrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk hidup yang selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik atau memerlukan perubahan. Perubahan tersebut akan dapat diwujudkan melalui pembangunan (development). Adapun pengertian pembangunan atau development adalah :

1. Menurut RP. Mirza (1982 : 2), *Development is basically as human enter prize and therefore it requires the combined efforts of all system of knowledge, be they physical, biological, social og human to comprehend and articulate it.* (pembangunan adalah usaha manusia dan untuk memahami pembangunan tersebut dibutuhkan usaha-usaha yang terpadu dari seluruh sistem pengetahuan, baik fisik, biologi, sosial maupun manusia).
2. Sedangkan menurut S.P. Siagian (1983 : 23) pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh sebuah bangsa dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka dalam pembinaan bangsa

Pembangunan itu mengandung beberapa unsur penting yaitu :

- Usaha atau proses,
- Peningkatan, kemajuan, atau perubahan ke arah kemajuan,
- Berkesinambungan,
- Dilakukan secara sadar atau sengaja,
- Terencana,
- Untuk tujuan pembinaan (pembangunan) bangsa, dan
- Dilakukan secara bertahap.

Peran Mahasiswa dalam Kebijakan Pembangunan

Mahasiswa adalah elemen masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengontrol aktivitas pembangunan dalam sebuah negara, hal ini sangat sesuai dengan misi yang diemban oleh mahasiswa Indonesia atau mahasiswa yang berdomisili di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kebijakan pembangunan merupakan salah satu product politik dalam sebuah

negara, sudah sewajarnya harus dikontrol secara ketat oleh elemen masyarakat termasuk didalamnya unsur mahasiswa.

Partisipasi mahasiswa dalam menyukseskan kebijakan pembangunan dilakukan tidak lain adalah untuk menghindari terjadi penyimpangan tujuan pembangunan itu, sehingga hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam sebuah negara. Peranan ini yang dimainkan oleh mahasiswa sebagai peran *social control* dan *agent of change*.

Sebagai Agent of Change dan Social Control

Hasil pemikiran pemuda/mahasiswa tidak akan ada gunanya jika tidak disalurkan dengan benar dan efektif. Oleh karena itu perlu adanya sarana yang tepat agar fungsi kontrol sosial dan agent of change dapat tercapai. Hal ini menjadi penting karena pemerintah dan masyarakat dapat melihat secara jelas apa sebenarnya peran *Social Control* dan *Agent of Change* yang diperankan oleh mahasiswa atau insane akademik lainnya. Selain itu, karena wilayah kita sangat luas serta pusat kekuasaan sentralistis di Jakarta, maka peranan media massa menjadi sangat penting dalam gerakan ini. Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai sarana penyampaian pesan kontrol sosial dan agent of change oleh mahasiswa adalah:

1. *Pesan kontrol sosial dan agent of change* ini biasanya dilontarkan pada diskusi-diskusi lokakarya, seminar maupun kegiatan ilmiah lainnya. Namun sarana ini dipandang sering tidak efektif karena khalayaknya terbatas, kecuali jika disiarkan melalui media komunikasi yang efektif. Sarana ini mungkin lebih cocok untuk 'brainstorming' tentang suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
2. *Sarana kontrol sosial mahasiswa lainnya* yang banyak dipakai adalah dengan memanfaatkan media massa secara langsung, seperti surat kabar, radio, dan televisi. Sarana kontrol sosial melalui media massa ini cukup efektif jika yang diinginkan sekedar penyampaian informasi (*perubahan kognitif*). Untuk mencapai kepada perubahan perilaku khalayaknya agak sulit. Tetapi memiliki kelebihan lain yang sangat signifikan. Berupa kemampuan mencapai jangkauan yang sangat luas pada waktu yang sangat singkat (terutama yang tergolong media massa elektronik). Jumpa pers/pers realise merupakan contoh yang paling sering digunakan suatu organisasi pemuda/mahasiswa untuk menyikapi suatu peristiwa.
3. *Sarana kontrol sosial dan agent of change* yang sangat populer pada era reformasi adalah dengan cara melakukan demonstrasi, dimana pesan kontrol sosial dapat langsung diarahkan pada lembaga/instansi yang dituju.
4. Dialog dengan instansi/pejabat pemerintah yang dianggap representatif dengan para pembuat kebijakan pembangunan dalam sebuah negara dengan substansi kontrol sosial juga merupakan sarana yang populer digunakan. Namun sarana ini juga kadang ditolak karena berbagai alasan.

Kesimpulan

Mahasiswa yang kita kenal sebagai elemen masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam sebuah Negara dan bangsa serta daerah, apabila mahasiswa tidak proaktif, maka perubahanpun sulit dicapai dalam mencapai kemajuan Negara dan bangsa. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dalam menyampaikan kritik-kritik kepada pembuat kebijakan pembangunan harus mengikuti etika-etika akademik yang berlaku, yaitu; sopan atau beretika,
- b. Mahasiswa telah banyak berbuat dinegari ini, seperti perubahan budaya politik baik pada masa orde lama, orde baru maupun orde reformasi demi kemajuan bangsa dan Negara ini. Bahkan dalam perjuangannya mereka banyak yang gugur sebagai pahlawan reformasi.
- c. Peranan mahasiswa dalam harus didukung dan menjadikan mereka sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, bukan sebaliknya. Jika komponen mahasiswa, masyarakat dalam pemerintah bekerjasama dan sama-sama bekerja maka Negara Indonesia pada khususnya dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada khususnya akan menjadi *bandatun thaibatun wa rabbul grafur*.

Saran-Saran.

Mahasiswa yang memegang dua fungsi penting ini seperti yang telah diuraikan di atas, sehingga mahasiswa mempunyai marwah dihadapan khalayak ramai atau masyarakat umum, disarankan :

- a. Mahasiswa supaya dapat menyahuti persoalan-persoalan social yang terjadi di dalam masyarakat, harus meningkatkan profesional dan kompetensi sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing.
- b. Mahasiswa harus menjadi tauladan dalam masyarakat baik yang berkenaan perilaku, etika bahkan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman dan Taqwa (IMTAQ).
- c. Mahasiswa harus mampu menjembatani antara berbagai komponen masyarakat dengan pemerintah serta bersifat independent.

Daftar Pustaka

- Siagian, S.P. 1993. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, PT. Rosda Karya.
- Rasyidin. 2004. *Peranan mahasiswa dalam melahirkan Intelektual Madani*. Makalah Ceramah Pembekalan Mahasiswa Baru (OSPEK) tahun akademik 2004/2005 di Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe.

Riant Nigroho D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia

Amin Ibrahim. 2004. *Pokok-pokok analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.

http://rudycr.tripod.com/sem2_023/nurita_sinaga.htm (tanggal 23 Agustus 2005).
